BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Aparatur

2.1.1 Pengertian Kinerja

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:P.570) memberikan defenisi kinerja diartikan sebagai: (1) sesuatu yang dicapai, (2) prestasi yang diperlihatkan, (3) kemampuan kerja". Snell SA (1992:P.329) menyatakan bahwa "kinerja merupakan kulminasi dari tiga elemen yang saling berkaitan, yakni keterampilan, upaya, bersifat eksternal". Tingkat keterampilan merupakan bahan baku yang dibawa oleh seseorang ketempat kerjanya, seperti pengetahuan, kemampuan, kecakapan interpersonal serta kecakapan-kecakapan teknis. Tingkat upaya dapat digambarkan sebagai motivasi yang diperlihatkan oleh seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan kondisi-kondisi eksternal adalah tingkat sejauh mana kondisi-kondisi eksternal mendukung kinerja seseorang.

Kinerja adalah suatu ukuran yang mencakup keefektifan dalam pencapaian tujuan dan efesiensi yang merupakan rasio dari keluaran efektif terhadap masukan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu (Robbins, 1996:P.24).

Kinerja diberi batasan oleh Maier sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih tegas lagi Parter dan Lawler menyatakan bahwa kinerja adalah *"succesful role achievent"* yang diperoleh seseorang dari perbuatan-perbuatannya (as'ad,2003:P.47).

Dari batasan-batasan tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Menurut Vroom tingkat sejauh mana keberhasilan seseorang di dalam melaksanakan tugas pekerjaannya disebut "level of performance" (As'ad,2003:P.48). Biasanya orang yang mempunyai *level of performance* tinggi, disebut sebagai orang produktif dan sebaliknya orang yang mempunyai *level of performance* rendah (tidak mencapai standar) dikatakan sebagai orang yang tidak produktif.

Handoko (1998:P.7) "dua konsepsi utama untuk mengukur kinerja *(performance)* seseorang adalah efisiensi dan efektifitas". Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Efisiensi ini merupakan konsep matematik atau merupakan perhitungan rasio antara pengeluaran *(output)* dan masukan *(inful).* Seorang pegawai yang efisien adalah seorang yang mencapai keluaran yang lebih tinggi (hasil, produktifitas, kinerja) dibanding masukan-masukan (tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu). Dengan kata lain, dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas. Sedangkan efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang pegawai yang efektif adalah seorang yang dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan dengan metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama

satu periode waktu. Secara lebih tegas Amstron dan Baron mengatakan kinerja, bahwa "Kinerja adalah hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepusan konsumen dan memberikan konstribusi ekonomi" (Amstrong dan Baron, 1998:15).

Definisi tersebut menerangkan bahwa kinerja merupakan hasil dari pekerjaan yang berkaitan erat dengan tujuan organisasi, kepuasan konsumen selaku pemakai dan memberikan kontribusi ekonomi. Lebih jauh Indra Bastian menyatakan bahwa:

> "kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis *(strategic planning)* suatu organisasi" (Bastian, 2003:13).

Pendapat tersebut mengemukakan bahwa kinerja memberi gambaran tingkat pencapaian untuk melaksanakan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mewujudkan sasaran sebagai tujuan dari suatu organisasi, misi organisasi dan visi dari organisasi tersebut yang tertuang dalam perumusan perencanaan suatu organisasi. Pendapat lain tentang kinerja dikatakan oleh Anwar Prabu Mangkunegara, bahwa "Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya" (Mangkunegara, 2000:67).

Pendapat tersebut mengemukakan bahwa, kinerja tersebut dapat dijelaskan sebuah prestasi kerja atau hasil kerja *(output)* dari seseorang karyawan/pegawai baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh

karyawan/pegawai dalam melaksanakan tugas kerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

2.1.2 Pengertian Aparatur

Aparatur pemerintahan merupakan aset yang paling penting yang harus dimiliki oleh suatu instansi pemerintah yang harus diperhatikan untuk menghasilkan kinerja pemerintahan yang baik dan efisien sesuai dengan bidang kemampuan yang dimiliki oleh setiap aparatur pemerintahan yang ada sehingga setiap aparat dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang diembannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Dharma Setyawan Salam dalam buku *Manajemen Pemerintahan Indonesia,* menyebutkan bahwa ”aparatur pemerintahan sebagai *social servant* yaitu pekerja yang digaji oleh pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat” (Salam, 2004:169).

Definisi di atas menerangkan bahwa aparatur merupakan pegawai dari sektor negeri atau pemerintahan yang digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara teknis sesuai dengan tingkat jabatannya dan berfungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan pencapaian tujuan dari setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah pada dasarnya sangat tergantung dari tingkat kemampuan sumber daya aparatur yang dimilikinya sebagai pelaksana dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, oleh sebab itu maka faktor SDM sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan kegiatan yang

dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut Buchari Zainun dalam buku *Manajemen Sumber Daya Manusia,* menyebutkan bahwa ”sumber daya manusia adalah daya atau tenaga atau kekuatan atau kemampuan yang bersumber dari manusia” (Buchari, 2001:64). Berdasarkan hal tersebut bila dikaitkan dengan aparatur, maka sumber daya aparatur pemerintahan merupakan segala daya, tenaga, kekuatan dan kemampuan yang bersumber dari aparatur pemerintahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai pelaksana dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut Dharma Setyawan, menyebutkan bahwa “Aparat Pemerintah adalah pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan, melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku” (Setyawan, 2004:169).

Berdasarkan pengertian di atas, maka aparatur pemerintahan merupakan seseorang yang digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah secara teknis dengan berdasarkan ketentuan yang ada. Pentingnya profesionalisme aparatur pemerintah sejalan dengan Pasal 3 UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa:

> “Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan” (UU Nomor 8 Tahun 1974).

Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masing-masing. Hasil dari pekerjaan itu lebih ditinjau dari segala segi sesuai porsi, objek, bersifat terus-menerus dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun serta jangka

waktu penyelesaian pekerjaan yang relatif singkat. Profesionalisme juga perlu dilakukan oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada Bagian Data dan Informasi Kesehatan dalam menerapkan SIRS sebagai informasi kesehatan. Victor M. Situmorang dan Jusuf Muhir mengemukakan bahwa aparatur pemerintahan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bersih,
2. Berwibawa,
3. Bermental baik, dan
4. Mempunyai kemampuan profesional yang tinggi.
   (Situmorang, 1994:83).

Ciri-ciri tersebut merupakan gambaran ideal yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan, yang ditunjukan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini diperjelas kembali oleh Situmorang bahwa aparatur pemerintahan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi aparatur pemerintahan sebagai abdi negara yakni:
   a. Sebagai pemikir,
   b. Sebagai perencana,
   c. Sebagai penggerak pembangunan,
   d. Sebagai pelaksana dari tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan, dan
   e. Sebagai pendukung kelancaran pembangunan.
2. Fungsi aparatur pemerintahan sebagai abdi masyarakat, yakni:
   a. Melayanai masyarakat,
   b. Mengayomi masyarakat,
   c. Menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarkat
   d. Membina masyarakat, dan
   e. Tanggap terhadap pandangan-pandangan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat.
      (Situmorang, 1994: 84-85)

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa seorang aparatur adalah abdi bagi pemerintah maupun masyarakat. Aparatur dianggap sebagai bawahan pemerintah untuk melayani masyarakat, dalam hal ini aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Barat pada Bagian Data dan Informasi Kesehatan harus memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat hal ini sebagai wujud pengabdian kepada pemerintah maupun masyarakat. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada Bagian Data dan Informasi Kesehatan kepada masyarakat adalah melalui SIRS.

2.1.3 Kinerja Aparatur

kinerja aparatur adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah secara teknis sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh karena itu bila ingin tercapainya tujuan yang telah ditetaapkan sebelumnya, maka perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja tersebut. Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan *(ability)* dan faktor motivasi *(motivation).* Hal ini sesuai dengan pendapat Keith Davis (1985:484) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

1. *Ability*
   Psychologically, ability consists of potential ability (IQ) and reality (knowledge + skill). It is means that leader and subordinate with IQ on average (110-120), even superior IQ, very superior, gifted and genius with right education for right position and capable in daily working, is easy to get the maximum performance.
2. *Motivation*
   It is considered as the leader attitude and subordinate to the workplace. Anyone with positive attitude to their working condition is will shows high motivation and vice versa. The meaning of situation is that there is working

contact, facility, atmosphere, leader policy, leadership model and working condition.
(Davis, 1985:484).

Berdasarkan pendapat ahli di atas jelaslah bahwa faktor kemampuan dapat mempengaruhi kinerja karena dengan kemampuan yang tinggi maka kinerja pegawaipun akan tercapai, sebaliknya bila kemampuan pegawai rendah atau tidak sesuai dengan keahliannya maka kinerjapun tidak akan tercapai. Begitu juga dengan faktor motivasi yang merupakan kondisi yang menggerakan diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal.

2.1.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

Aparatur sebagai pelayan masyarakat, harus memberikan pelayan terbaik untuk suatu kinerja. Kenyataannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan tidaklah mudah, banyak hambatan-hambatan yang harus dilewati. Menurut Keith Davis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, faktor tersebut adalah faktor kemampuan *(ability)* dan motivasi *(motivation)* aparatur.

1. Faktor Kemampuan *(ability)*

Kemampuan seorang aparatur berbeda-beda, kemampuan dapat dilihat dari kecerdasan ataupun bakat dari aparatur tersebut. Pengertian kemampuan menurut Moenir bahwa:

> "Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas/pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan" (Moenir, 2002:116).

Berdasarkan teori di atas, kemampuan sebagai keadaan yang dimiliki seseorang sehingga memungkinkan dirinya untuk dapat melakukan sesuatu

berdasarkan keahlian dan ketarampilannya. Kaitannya dengan penerapan SIRS pada Bagian Data dan Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, kemampuan aparatur merupakan salah satu faktor penunjang kemampuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada Bagian Data dan Informasi Kesehatan untuk dapat meningkatkan kinerja aparaturnya. Setiap organisasi membutuhkan pengelola, dan pengelola tersebut tidak lain adalah aparatur yang terdapat di dalamnya. Kemampuan *(ability)* terdiri dari dua indikator yaitu:

a. Kemampuan potensi *(IQ),* merupakan kesiapan tenaga dan pikiran dari seorang aparatur dalam mengerjakan pekerjaannya.
b. Kemampuan realita *(reality),* merupakan kemampuan realita dari seorang aparatur dalam mengerjakan pekarjaannya. Kemampuan realita *(reality)* terdiri dari dua bagian yaitu:
    a) Kemampuan realita *(reality) knowledge,* merupakan kemampuan yang diperoleh melalui belajar atau pendidikan.
    b) Kemampuan realita *(reality) skill,* merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keterampilan dan pelatihan.

2. Faktor motivasi *(motivation)*

Motivasi *(motivation)* merupakan kondisi atau energi yang menggerakan diri aparatur yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi. Sikap mental aparatur yang pro dan positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal.

Pengertian lain tentang motivasi dikatakan oleh Keith Davis dalam Mangkunegara, yang berpendapat bahwa:

> "Motivasi diartikan suatu sikap *(attitude)* pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja *(situation)* di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja" (dalam Mangkunegara, 2006:14)

Motivasi dalam arti bagaimana aparatur menafsirkan lingkungan kerja mereka. Kemampuan kerja yang ditunjukan aparatur didasari atas faktor-faktor apa yang memberi andil dan berkaitan dengan efek negatif terhadap kemampuan aparatur serta apa yang menimbulkan kegairahan dalam bekerja. Faktor motivasi terdiri dari dua indikator yaitu:

a. Sikap *(attitude)*, merupakan mental yang dimiliki seorang aparatur dalam mengerjakan pekerjaannya.
b. Situasi *(situation)*, merupakan suatu keadaan atau kondisi kerja dalam lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi sikap seseorang aparatur.

Secara psikologis, aspek yang sangat penting dalam kepemimpinan kerja adalah sejauhmana pimpinan mampu mempengaruhi motivasi kerja SDM-nya agar mereka mampu bekerja produktif dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan pendapat ahli di atas jelaslah bahwa faktor kemampuan dapat mempengaruhi kinerja karena dengan kemampuan yang tinggi maka kinerja pegawaipun akan tercapai, sebaliknya bila kemampuan pegawai rendah atau tidak sesuai dengan keahliannya maka kinerjapun tidak akan tercapai. Begitu juga dengan faktor motivasi yang merupakan kondisi yang menggerakan diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal.

2.2 *E-Government*

E-government sekarang ini menjadi salah satu pembahasan dalam pemerintahan. *E-government* di sini diartikan sebagai pemerintahah *digital*, pemerintah *online,* yang dapat menghubungkan secara lebih mudah dan transparan. Interaksi antara pemerintah dan warga negara (*G2C*-pemerintah ke warga negara), pemerintah dan perusahaan bisnis (*G2B*-pemerintah ke perusahaan bisnis) dan hubungan antar pemerintah (*G2G*-hubungan inter-agency).

Tenaga teknis yang handal dapat membantu pemerintah dalam *setup server* dan *acces point* di berbagai tempat. Contohnya antara lain adalah penyediaan informasi yang sering dicari oleh masyarakat. Informasi ini dapat berupa informasi kesehatan misalnya. Pengertian *E-government* menurut Edi Sutanta yaitu:

> ”*E-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meingkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi ini kemudian manghasilkan hubungan bentuk baru, seperti pemerintah kepada masyarakat, pemerintah kepada pemerintah dan pemerintah kepada bisnis atau pengusaha” (Sutanta, 2003:150)

Berdasarkan pengertian di atas, *E-government* yang ada dalam suatu pemerintahan berfungsi sebagai interaksi antara pemerintah kepada masyarakat, pemerintah kepada pemerintah dan pemerintah kepada bisnis atau pengusaha.

Kemampuan pemerintah sebagai organisasi kekuasaan seharusnya dapat menerapkan berbagai hal, termasuk di dalam penerapan *E-Government* yang menyediakan layanan dalam bentuk elektronik. *The World Bank Group* memberi pengertian *E-Government* sebagai berikut :

> *"E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government*. *E-Government* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *wide area network, internet* dan *mobile computing*) oleh organisasi pemerintah yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan" (dalam Indrajit 2002:3).

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa *E-Government* yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi oleh organisasi pemerintah yang mempunyai kemampuan yang dapat menghubungkan antar warga negara, lingkungan bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan.

Definisi lain *E-Government* diberikan oleh Zweers dan Planque seperti yang dikutip oleh Richardus E.Indrajit yaitu:

> "Berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronis, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan" (dalam Indrajit, 2002:3).

Definisi tersebut menjelaskan bahwa kehadiran *E-Government* sebagai penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan dalam bentuk elektronis, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu yang sesuai dengan makna era globalisasi pada masa sekarang dan memberikan nilai tambah untuk partisipasi pada semua kalangan.

Penerapan *E-Government* menginginkan adanya perubahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana yang dikatakan M. Khoirul Anwar dan Asianti Oetojo S. bahwa, "suatu sistem untuk penyelenggaraan pemerintahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terutama yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada

masyarakat" (Anwar dan Oetojo, 2003:136). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaran pemerintahan oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antar pemerintah dengan pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas pemerintah meningkat.

Adapun *G-Government* itu sendiri ditandai dengan adanya penggunaan jaringan komunikasi dengan tingkat konektivitas tertentu yang mampu menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Misalnya pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan kalangan bisnis, pemerintah dengan pemerintah dan pemerintah dengan pegawai.

2.2.1 Jenis-jenis *E-Government*

Penerapan *E-Government* memiliki beberapa jenis dalam memberikan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dalam mengkategorikan jenis-jenis *E-Government* tersebut dapat dilihat dari dua aspek utama. Aspek tersebut meliputi :

1. aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi *E-Government* yang ingin dibangun dan diterapkan, dan
2. aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh penggunanya.
   (Indrajit, 2004:29).

Keberadaan aspek-aspek di atas dapat memudahkan untuk membedakan jenis-jenis *E-Government* yang ada. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka

jenis-jenis *E-Government* dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu 1)*Publish* / Publikasi, 2) *Interact* / interaksi, 3)*Transact* / transaksi (Indrajit, 2004:30).

1. *Publish* / Publikasi

Merupakan implementasi *E-Government* yang termudah karena aplikasi yang digunakan tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam, selain itu juga skala yang digunakan kecil. Komunikasi yang digunakan merupakan komunikasi satu arah. Adapun menurut Richardus E. Indrajit *publish* yaitu:

> "Di dalam kelas *publish* ini yang terjadi adalah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui Internet" (Indrajit, 2004:30)

Dalam kelas *publish* / publikasi ini Internet merupakan sesuatu yang penting dalam menjalin komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan adanya Internet maka interaksi pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih cepat dan mudah.

2. *Interact* / interaksi

Interaksi ini terjadi antara pemerintah dengan mereka yang mempunyai kepentingan. Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk melakukan pelayanan interaksi ini yaitu:

> "Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas *searching* bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik. Jenis yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti *Chatting, tele-conference, web tv*) maupun tidak langsung (melalui *e-mail, frequent ask questions, newsletter,mailing list*)" (Indrajit, 2004:31)

Dalam jenis ini terdapat komunikasi yang diwujudkan dalam dua bentuk yaitu, komunikasi secara langsung dan tidak langsung (Indrajit, 2004:31). *Interact* / interaksi berpotensi meningkatkan peluang kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dengan pemerintah secara cepat dan bebas. Fasilitas yang diberikan dalam jenis ini adalah *polling* / ruang diskusi dalam situs *web* pemerintah.dengan adanya jenis ini maka komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat lebih cepat untuk disampaikan.

3. *Transact* / transaksi

Proses interaksi yang terjadi adalah interaksi dua arah dimana antara pemerintah dengan masyarakat yang mempunyai kepentingan. Dalam proses ini terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak kepihak lainnya. Seperti dikatakan Richardus E Indrajit bahwa:

> "Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada *interact*, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar kasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya)" (Indrajit, 2004:32)

Penerapan *E-Government* dalam jenis ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi dan interaksi saja, namun dapat terjadi proses transaksi yang melibatkan pertukaran uang atau pihak lain. Memerlukan biaya untuk melakukan proses interaksi tersebut. Aplikasi yang digunakan lebih sulit dibandingkan dengan *publish* serta *interact*. Dalam jenis interaksi ini diperlukan sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang yang dilakukan aman dan hak-hak *privacy* berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik.

2.2.2 Faktor-Faktor Pengembangan *E-Government*

Terdapat beberapa faktor dalam pengembangan *e-Government* faktor tersebut berasal dari faktor teknologi, ekonomi, globalisasi, nasional serta lokal. Berdasarkan hal tersebut maka akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor teknologi, peradaban manusia dari tatanan masyarakat agraris dan industrialis menuju masyarakat informasi.
2. Faktor ekonomi, dalam era reformasi terjadi transformasi dari ekonomi konvensional ke arah ekonomi digital dan ekonomi jaringan.
3. Faktor globalisasi, dengan liberalisasi perdagangan batas negara di bidang ekonomi semakin pudar, maka sangat perlu perencanaan yang matang dan menyeluruh di bidang teknologi informasi dan menciptakan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi yang memadai serta meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
4. Faktor nasional, era reformasi menuntut suatu pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab kepada rakyat.
5. Faktor lokal, adanya sektor pariwisata yang sangat perlu promosi potensi wisata. Disamping itu keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terbukti tahan hidup dalam kondisi ekonomi yang kritis.
   (Indrajit, 2002:27).

Penerapan *E-Government* merupakan suatu media dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan aktivitas kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah dalam penerapan *E-Government* senantiasa dikembangkan agar mampu bersaing di tengah persaingan global.

2.2.3 Indikator-Indikator dalam Pengembangan *E-Government*

Dalam penerapan *E-Government* terdapat indikator-indikator penting yang harus diperhatikan. Menurut Indrajit indikator-indikator tersebut meliputi:

1. Data infrastruktur,
2. Infrastruktur legal,
3. Infrastruktur institusional,
4. Infrastruktur manusia,

5. Infrastruktur teknologi, dan
6. Strategi pemikiran dan kepemimpinan.
   (Indrajit, 2002:25).

Berdasarkan indikator-indikator di atas, maka penerapan *E-Government* harus memenuhi berbagai hal seperti data infrastruktur yang memadai dan infrastruktur legal. Disamping itu kemampuan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam menerapkan teknologi informasi yang berbasis *E-Government*. Hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Data infrastruktur

Kesiapan data infrastruktur tersebut meliputi manajemen sistem, dokumentasi dan proses kerja ditempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang berfungsi mendukung menuju penerapan *E-Government* (Indrajit, 2002:25). Kemampuan mendokumentasi juga menjadi bagian dari standar penerapan *E-Government*. Dengan adanya dokumentasi maka prose mengevaluasi jadi lebih mudah.

2. Infrastruktur legal

Dasar hukum dan peraturan-peraturan merupakan landasan dalam penerapan *E-Government* (Indrajit, 2002:25). Selain itu dasar hukum dan peraturan-peraturan dijadikan strategi dari pemerintahan untuk menerapkan *E-Government* secara berkesinambungan. Adapun dasar hukum tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan ataupun Surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum.

3. Infrastruktur institusional

Infrastruktur institusional merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dalam membangun E-*Government.* Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan baik antar lembaga tentang penerapan *E-Government* (Indrajit, 2005:25). Selain melakukan koordinasi dapat juga dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kerjasama antar lembaga (Indrajit, 2002:26).

4. Infrastruktur manusia

Penerapan *E-Government* dalam pelaksanaannya membutuhkan kemampuan sumberdaya aparatur, karena penerapan *E-Government* yang harus didukung dengan aparatur yang berkompeten dibidang teknologi informasi (Indarajit, 2002:26). Adapun upaya untuk menciptakan sumberdaya aparatur yang berkualitas melalui pelatihan dan pendidikan yang berbasis teknologi informasi. Infrastruktur manusia merupakan hal yang penting dengan adanya sumberdaya manusia yang mendukung maka pelaksanaan penerapan *E-Government* dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

5. Infrastruktur teknologi

Inisiatif penerapan *E-Government* banyak bertumpu pada infrastruktur teknologi maka implementasi penerapan *E-Government* harus disesuaikan dengan kondisi infrastruktur yang tersedia. Dengan adanya infrastrukutr teknologi yang memadai maka penerapan *E-Government* akan berjalan sebagaimana mestinya (Indrajit, 2002:26). Adapun untuk mengetahui ketersediaan sarana teknologi yang dimiliki maka dapat dilihat melalui jumlah komputer atau sarana teknologi

lainnya yang menunjang dalam penerapan *E-Government* serta aanya jaringan komputer untuk lebih memudahkan dalam mengakses. (Indarajit, 2002:26).

6. Strategi pemikiran dan kepemimpinan

Penerapan *E-Government* di dalam pelaksanaannya membutuhkan pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang berkaitan dengan *E-Government*. Hal tersebut diperlukan agar agenda strategi serta pemikirannya yang berkaitan dengan *E-Government* akan diwujudkan secara nyata. Disamping itu juga pemimpin yang mempunyai wawasan tentang *E-Government* dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *E-Government* secara operasional (Indrajit, 2002:27).

SIRS sebagai salah satu wujud pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan implementasi *E-Government* yang sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government* sesungguhnya merupakan sebuah bentuk terobosan, walau dilakukan di sebuah negara yang budaya IT-nya belum berkembang sebagaimana Indonesia sekarang ini.

2.3 Penerapan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)

2.3.1 Pengertian Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil (Badudu & Zain,

1996:1487). Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan (Ali, 1995:1044). penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Adapun menurut Riant Nugroho penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang dinginkan (Nugroho, 2003:158).

Berbeda dengan Nugroho, menurut Van Meter dan Van Horn menerangakn, bahwa "penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan" (dalam Wahab, 1997:65). Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan ke dalam masyarakat.

2.3.2 Unsur-Unsur Penerapan

Penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan,
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, dan
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.
   (Wahab, 1990:45).

Berdasarkan pengertian di atas maka penerapan mempunyai unsur yaitu program, target dan pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan dalam sebuah organisasi atau lingkungan kerja.

2.3.3 Pengertian Sistem

Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan. Menurut Scott, dalam bukunya M. Khoirul Anwar yang berjudul *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintah Di Era Otonomi Daerah,* sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan *(input)*, pengolahan *(processing)* serta keluaran *(output).* (Scott dalam Anwar, 2004:5). Sedangkan informasi menurut Mcfadden yang dikutip oleh Abdul Kadir dalam bukunya yang berjudul *Pengenalan Sistem Informasi* adalah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. (dalam Kadir, 2006:31).

Berdasarkan pengertian informasi di atas Edhy Sutanta mengemukakan beberapa fungsi informasi, yaitu:

1. Menambah pengetahuan,
2. Mengurangi ketidakpastian,
3. Mengurangi resiko kegagalan,
4. Mengurangi keanekaragaman/variasi yang tidak diperlukan, dan
5. Memberi standar, aturan-aturan, ukuran-ukuran, dan keputusan-keputusan yang menentukan pencapaian sasaran dan tujuan.
   (Sutanta, 2003:11).

Berdasarkan penjelasan definisi-definsi di atas, sistem informasi merupakan data yang diproses sedemikian rupa yang terdiri dari unsur-unsur seperti masukan, pengolahan serta keluaran yang tersusun secara sistematis dan berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Sistem informasi merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan. karena sistem informasi, bertujuan untuk menyajikan suatu informasi, yang pada akhirnya informasi tersebut berguna dalam pengambilan suatu keputusan.

Sejalan dengan definisi di atas, sistem informasi menurut Hall yang dikutip oleh Abdul Kadir dalam bukunya yang berjudul *Pengenalan Sistem Informasi,* adalah ”Sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai” (Hall dalam Kadir, 2006:11).

2.3.4 Pengertian Informasi

Informasi sangat dibutuhkan agar dapat mengetahui keakuratan data yang dihasilkan. Informasi ibarat data yang mengalir didalam tubuh suatu organisasi, informasi ini sangat penting dalam pengambilan keputusan didalam suatu organisasi. Menurut McFadden mendefinisikan informasi sebagai sebuah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Informasi dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Dengan adanya informasi,tingkat kepastian menjadi meningkat.

Informasi dapat mengenai data mentah, data tersusun, kapasitas sebuah saluran komunikasi dan lain sebagainya. Informasi merupakan suatu data yang diolah menjadi suatu bentuk penting nilai yang nyata atau dapat dirasakan baik dalam keputusan-keputusan yang sekarang maupun yang akan datang. Menurut pendapat Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, mendefinisikan pengertian informasi sebagai berikut:

> "*Information is data that has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is of real or perceived value in current or prospective decisions"*. (Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai

> nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang)" (Hasibuan, 1996:258).

Berdasarkan pengertian di atas, maka informasi merupakan suatu data yang telah diolah menjadi suatu informasi bagi si penerima informasi dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan langsung oleh si penerima informasi dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan yang akan datang. Menurut Wahyono, mengatakan dari pengertian informasi bahwa:

> "informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan" (Wahyono, 2004:3).

Berdasarkan pengertian di atas, maka kegunaan informasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Sedangkan nilai dari pada informasi ditentukan oleh manfaat, biaya dan kualitas maksudnya bahwa informasi dianggap bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya.

Menurut McFadden, dalam bukunya Abdul Kadir yang berjudul *Pengenalan Sistem Informasi*, mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut (dalam Kadir, 2002:31). Sedangkan menurut Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. (dalam Kadir, 2002:31).

Jogiyanto mengemukakan, bahwa informasi adalah hasil pengolahan

data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi. (Jogiyanto, 1999:8). Dari pengertian beberapa sumber di atas maka informasi merupakan kumpulan data-data yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat memberikan arti dan manfaat sesuai dengan keperluan tertentu yang bisa menjadi suatu informasi.

Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat berbicara banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputuan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan tindakan lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data yang ditangkap dianggap sebagai input, diproses kembali melalui model dan seterusnya membentuk suatu siklus. Menurut Mc. Leod informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Akurat, artinya harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya,
2. Tepat waktu, artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi itu diperlukan,
3. Relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai yang dibutuhkan, dan
4. Lengkap, artinya informasi harus diberikan secara lengkap.
   (Jogiyanto, 1999:10).

Pendapat di atas tersebut mengemukakan, bahwa informasi yang dihasilkan dikatakan berkualitas, apabila infomasi yang didapatkan akurat, tepat waktu, relevan serta lengkap. Suatu informasi merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk pengambilan keputusan, karena informasi merupakan faktor penting dalam melakukan kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem informasi

adalah kumpulan informasi didalam sebuah basis data menggunakan model dan media teknologi informasi digunakan di dalam pengambilan keputusan bisnis sebuah organisasi. Di suatu organisasi, informasi merupakan sesuatu yang penting didalam mendukung proses pengambilan keputusan.

2.3.5 Pengertian Sistem Informasi

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya mempunyai tiga fungsi yaitu pemberdayaan *(empowerment),* pembangunan *(development),* dan pelayanan *(service).* Upaya peningkatan pelayanan sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah.

Sistem informasi adalah kumpulan informasi didalam sebuah basis data menggunakan model dan media teknologi informasi digunakan didalam pengambilan keputusan bisnis sebuah organisasi. Di suatu organisasi, informasi merupakan sesuatu yang penting didalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen.

Setiap informasi menurut Teguh Wahyono memiliki beberapa karakteristik yang menunjukan sifat dari informasi itu sendiri, yaitu:

1. Benar atau salah : Karakteristik tersebut berhubungan dengan sesuatu yang realitas atau tidak dari sebuah informasi,
2. Baru : sebuah informasi dapat berarti sama sekali baru bagi penerimanya,
3. Tambahan : sebuah informasi dapat memperbaharui atau memberikan nilai tambah pada informasi yang telah ada,
4. Korektif : sebuah informasi dapat menjadi bahan koreksi bagiinformasi sebelumnya, salah atau palsu, dan
5. Penegas : informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada, hal ini masih berguna karena dapat meningkatkan persepsi penerima atas kebenaran informasi tersebut.
   (Wahyono, 2004:6).

Informasi dengan perkembangannya yaitu melalui tertulis dan tidak tertulis, sedangkan sekarang informasi juga bisa melalui elektronik (*digital*) yang memiliki karakter tersendiri.

Perkembangan informasi menyatu dengan komputer dan menciptakan suatu jaringan sistem informasi. Pengertian sistem informasi dikemukakan oleh Teguh Wahyono, yaitu "Sistem informasi pada dasarnya merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi" (Wahyono, 2004:17).

Sistem informasi di dalam suatu organisasi mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, manajerial, dan kegiatan strategi organisasi untuk menyediakan kebutuhan.

Kelengkapan sistem informasi menurut Teguh Wahyono dalam bukunya yang berjudul *Sistem Informasi Konsep Dasar Analisis Desain dan Implementasi SIMDA,* yaitu:

1. *Hardware* : Bagian ini merupakan perangkat keras sistem informasi. Sistem informasi modern memiliki perangkat keras seperti komputer, printer dan teknologi jaringan komputer,
2. *Software* : Bagian ini merupakan bagian perangkat lunak sistem informasi. Sistem informasi modern memiliki perangkat lunak untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas yang harus dilakukan, seperti *Windows* dan *Microsoft office,*
3. Data : merupakan komponen dasar dari informasi yang akan di proses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Seperti contoh adalah dokumen bukti-bukti transaksi, nota, kuitansi dan sebagainya,
4. Prosedur : Merupakan bagian yang berisikan dokumentasi prosedur atau proses-proses yang terjadi dalam sistem. Prosedur dapat berupa buku-buku penuntun operasional seperti prosedur sistem pengendalian intern atau buku penuntun teknis seperti buku manual menjalankan program komputer dan sebagainya, dan
5. Manusia : Manusia merupakan bagian utama dalam mengoperasikan suatu sistem informasi.
   (Wahyono, 2004:19-20).

Menurut peneliti perangkat hardware dan software komputer sudah semakin canggih, yang diperlukan sekarang adalah untuk mengoreksi SDM. SDM yang dimaksud adalah kinerja pegawai supaya bisa beradaptasi dengan teknologi sistem informasi dan menyusun data yang sesuai prosedur.

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi, yaitu:

1. Sumber daya manusia,
2. Penggunaan metode untuk analisa,
3. Penggunaan komputer sebagai alat bantu, dan
   (Wahyono, 2004:24).

Dari ketiga unsur di atas semuanya saling berkaitan satu sama lain. Materi yang peneliti bahas adalah berkaitan dengan kinerja sebuah organisasi atau instansi pemerintahan. Kinerja organisasi memiliki faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam mengembangkan sistem informasi.

2.3.6 Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)

Pada era globalisasi ini biasa dikatakan seluruh perangkat kerja di berbagai organisasi telah menggunakan dan menerapkan konsep sistem informasi yang modern. Keculai di beberapa kawasan di negara berkembang dan terbelakang yang dianggap masih belum tersentuh oleh pengaruh dampak teknologi. Penerapan sistem informasi tersebut terlihat di berbagai kantor-kantor, supermarket, rumah sakit, lembaga pendidikan, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Dan penggunaan sistem informasi ini tanpa kita sadari merupakan kebutuhan bukan lagi dianggap sebagai pelengkap semata.

Salah satu penerapan sistem informasi tersebut sebagai salah satu wujud pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah dengan diterapkannya SIRS melalui rumah sakit yang berfungsi memanajemen data-data pasien dan mempercepat kinerja rumah sakit dalam melayani pasien.

SIRS adalah suatu sistem informasi manajemen pencatatan pelaporan rumah sakit dan direkapitulasi di setiap tingkatan administrasi dengan waktu tertentu. SIRS ini diterapkan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada Bagian Data dan Informasi Kesehatan dan dikelola khusus oleh operator bagian IT, sedangkan penganggung jawab SIRS adalah kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Peraturan Undang-Undang yang menyebutkan sistem informasi kesehatan ini adalah Kepmenkes Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi bidang kesehatan. Tujuan umum SIRS adalah didapatkan semua data hasil kegiatan rumah sakit dan data lainnya yang berkaitan, serta dilaporkan data tersebut kepada jenjang administrasi di atasnya sesuai dengan kebutuhan secara tepat, cepat dan akurat.

Tujuan khusus SIRS yaitu tercatatnya semua data hasil kegiatan rumah sakit dan data berkaitan dalam format-format yang telah ditentukan dengan benar dan berkesinambungan, terlapornya data tersebut di jenjang administrasi yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan dan mempergunakan format yang telah ditetapkan secara benar, berkelanjutan dan teratur, terolahnya data tersebut menjadi informasi di rumah sakit dan di setiap jenjang administrasi di atasnya, sehingga bermanfaat untuk mengetahui permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat serta mermuskan cara penanggulangan secara tepat. Diperolehnya

persamaan pengertian tentang SIRS meliputi batasan operasional, tatacara pengisian format, pengolahan data dan informasi dan mekanisme pelaporannya, pelaksanaan SIRS di semua jenjang administrasi, sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna dalam pengolahan upaya kesehatan masyaraakt dan di perolehnya satu sumber data yang dapat diapakai, dimanfaatkan data dengan benar, akurat dan sama.

SIRS merupakan sebuah sistem informasi kesehatan dengan menggunakan sistem *data base* dan jaringan komunikasi yang difasilitasi dengan aplikasi layanan dokumen rumah sakit dan berfungsi memanajemen data-data pasien dan mempercepat kinerja rumah sakit dalam melayani pasien. setiap rumah sakit yang tercatat di Departemen Kesehatan wajib mengikuti SIRS yang telah ditetapkan, sesuai dengan prosedur.